

## ABSTRAK

Konten homoseksual masih menuai kontroversi di negara Indonesia. Berdasarkan kaidah fikih bahwa *sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram*. Konten yang ditayangkan melalui media apapun jika di dalamnya terdapat unsur yang melanggar syariat maka hukumnya haram. Begitu pula dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membicarakan tentang larangan terhadap konten-konten yang melanggar nilai-nilai hukum di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ada empat. Pertama, bagaimana muatan konten homoseksual pada film *cherry blossom after winter*. Kedua, bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap konten homoseksual pada film *cherry blossom after winter*. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tayangan konten Homoseksual pada film *cherry blossom after winter*. Keempat, analisis persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai jenis penelitian Normatif yang menggunakan sumber data kualitatif dan terdiri dari sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF), serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif komparatif. Dengan hasil penelitian bahwa dalam film *Cherry Blossom After Winter* memiliki muatan homoseksual. Dimana dalam pandangan hukum Islam menghukuminya sebagai sesuatu yang haram. Begitu pula dengan hukum Positif yang diatur dalam KUHP, UU Pornografi dan UU

ITE melarang tayangan tersebut. Persamaan kedua hukum tersebut terhadap kasus yang terjadi bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif melarang tindakan, penyebaran, mengedarkan dan sebagainya terhadap konten-konten homoseksual, adapun perbedaannya bahwa dalam hukum Islam mutlak melarang tindakan tersebut, akan tetapi dalam UU Pornografi ada pengecualian dalam membolehkan pembuatan hingga pengedaran tayangan pornografi seperti yang terlampir dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2)

Kata Kunci: Hukum, Islam, Homoseksual, Film

### **ABSTRACT**

*Homosexual content is still controversial in Indonesia. Based on the rule of jurisprudence that the means that lead to illegal acts are haram. Content that is displayed through any media if there are elements that violate Sharia then the law is haram. Similarly, it is explained in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which talks about the prohibition of content that violates legal values in Indonesia. There are four problem formulations in the study. First, how the content of homosexual content in the cherry blossom film after winter. Second, how is the review in Islamic law of homosexual content in the film cherry blossom after winter. Third, how is the positive legal review of the showing of Homosexual content in the cherry blossom film after winter. Fourth, analyze the similarities and differences between the two views. The method used in this study uses a type of Normative research that uses qualitative data sources and consists of secondary data sources which include primary legal materials in the form of the Criminal Code (KUHP), Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and Government*

*Regulation Number 18 of 2014 concerning the Film Censorship Institute (LSF), as well as secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques use literature studies with comparative descriptive analysis. With the results of research that in the film Cherry Blossom After Winter has homosexual content. Where in the view of Islamic law punishes it as something haram. Similarly, the Positive law stipulated in the Criminal Code, the Pornography Law and the ITE Law prohibit such shows. The similarity of the two laws to the case that both Islamic law and positive law prohibit the act, dissemination, circulation and so on of homosexual content, while the difference is that in Islamic law absolutely prohibits such acts, but in the Pornography Law there are exceptions in allowing the manufacture and distribution of pornographic shows as attached to Article 13 paragraphs (1) and (2).*

Keywords: Law, Islamic, Homosexual, Film